



Analisis Gerakan #SaveRajaAmpat dalam Konsep *Politicized Collective Identity*

Tommy Andryandy¹, Fatih Raftsaal H. Kuswanto²

Universitas Paramadina, Indonesia

Email Korespondens: Tommi.andryandy@students.paramadina.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 16 Januari 2026

ABSTRACT

The acceleration of natural resource exploitation within national and global development agendas has increasingly generated environmental conflicts that extend beyond ecological concerns to encompass social and political dimensions. One prominent case is the opposition to nickel mining activities in Raja Ampat Regency, Southwest Papua, which has been articulated through the #Save Raja Ampat campaign. This study aims to analyze how the campaign operates as an environmental political message and how collective identity is politicized in the process of resistance against extractive state policies. Employing a qualitative approach, this research utilizes literature review and political message analysis. The main analytical framework is the concept of politicized collective identity proposed by Simon and Klandermans, which emphasizes three stages of identity politicization: collective grievance awareness, adversarial attribution, and the involvement of broader publics through triangulation. The findings indicate that the #Save Raja Ampat campaign not only represents opposition to nickel mining but also frames environmental conflict as an issue of ecological justice, indigenous rights, and unequal power relations between the state, corporations, and local communities. Campaign messages function to build collective awareness, symbolically identify opposing actors, and mobilize broader public support through arenas of political communication. This study concludes that environmental messages play a strategic role in mediating extractivist conflicts and transforming local issues into publicly contested political debates. Theoretically, this research contributes to the field of environmental political communication by highlighting the central role of collective identity in the analysis of environmental movement messaging.

Keywords: Environmental political communication, political messaging, politicized collective identity, environmental movement, Raja Ampat.

ABSTRAK

Percepatan eksploitasi sumber daya alam dalam agenda pembangunan nasional dan global kerap memunculkan konflik lingkungan yang tidak hanya bersifat ekologis, tetapi juga sosial dan politik. Salah satu kasus yang menonjol adalah penolakan terhadap aktivitas pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, yang diekspresikan melalui kampanye #Save Raja Ampat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kampanye tersebut beroperasi sebagai pesan politik lingkungan dan bagaimana identitas kolektif masyarakat dipolitisasi dalam proses perlawanan terhadap kebijakan ekstraktif negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis pesan politik. Kerangka analisis utama yang digunakan adalah konsep politicized collective identity dari Simon dan Klandermans, yang menekankan tiga tahap

politisasi identitas kolektif, yaitu kesadaran atas keluhan bersama, atribusi permusuhan, dan pelibatan masyarakat luas melalui proses triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kampanye #Save Raja Ampat tidak hanya merepresentasikan penolakan terhadap tambang nikel, tetapi juga membingkai konflik lingkungan sebagai persoalan keadilan ekologis, hak masyarakat adat, dan ketimpangan relasi kuasa antara negara, korporasi, dan warga. Pesan-pesan kampanye berperan dalam membangun kesadaran kolektif, menunjuk aktor lawan secara simbolik, serta memobilisasi dukungan publik yang lebih luas melalui ruang komunikasi politik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pesan lingkungan memiliki peran strategis dalam memediasi konflik ekstraktivisme dan mentransformasikan isu lokal menjadi isu publik yang diperdebatkan secara politis. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada kajian komunikasi politik lingkungan dengan menegaskan pentingnya identitas kolektif dalam analisis pesan gerakan lingkungan.

Kata Kunci: komunikasi politik lingkungan, pesan politik, identitas kolektif terpolitisasi, gerakan lingkungan, Raja Ampat.

PENDAHULUAN

Percepatan eksploitasi sumber daya alam dalam agenda pembangunan global dan nasional menempatkan isu lingkungan sebagai arena konflik sosial dan politik. Berbagai studi menunjukkan bahwa kebijakan ekstraktif termasuk pertambangan dan pemanfaatan sumber daya alam skala besar dapat memberikan tekanan ekologis dan memunculkan ketimpangan sosial, ketidakadilan distribusional, serta adanya kerentanan bagi kelompok masyarakat lokal dan adat yang hidup di wilayah terdampak. Dalam hal ini persoalan lingkungan dapat dipahami sebagai persoalan keadilan, kekuasaan, relasi politik antar negara, korporasi, dan warga (Healy & Barry, 2017). Literatur tentang social sustainability dan environmental justice menegaskan bahwa degradasi lingkungan seringkali berkelindan dengan marginalisasi sosial, di mana kelompok rentan menanggung risiko paling besar dari keputusan pembangunan yang tidak inklusif (Eizenberg & Jabareen, 2017). Krisis lingkungan kontemporer harus dipahami dalam kerangka batas aman dan adil sistem bumi (*safe and just Earth system boundaries*), yang menegaskan eksploitasi sumber daya alam melampaui ambang ekologis akan berdampak langsung pada kesejahteraan manusia dan stabilitas sosial lintas generasi (Rockström et al., 2023). Berbagai kedekatan kebijakan dan gerakan masyarakat sipil berkembang, termasuk advokasi berbasis solusi alam (*nature-based solutions*) dalam hal ini dimensi keadilan sosial dan partisipasi publik sebagai elemen kunci dalam tata kelola lingkungan berkelanjutan (Kabisch et al., 2016). Namun demikian, sejumlah penelitian juga mengingatkan bahwa intervensi lingkungan yang tidak sensitif terhadap konteks sosial justru berpotensi melahirkan ketidakadilan baru, sehingga menegaskan pentingnya pendekatan politik dan komunikatif dalam memahami dinamika konflik lingkungan (Wolch et al., 2014). Kampanye #Save Raja Ampat merupakan bentuk pesan perlawanan terhadap kebijakan ekstraktif negara, khususnya aktivitas pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Gerakan ini menunjukkan bahwa isu lingkungan tidak dapat dipahami semata sebagai persoalan ekologis, melainkan juga sebagai persoalan sosial, kultural, dan politik yang berkaitan langsung dengan relasi kuasa antara negara, korporasi, dan masyarakat

lokal. Dalam konteks tersebut, penolakan terhadap tambang nikel di Raja Ampat berkembang menjadi arena komunikasi politik, di mana pesan-pesan perlawanan diproduksi, didistribusikan, dan diperdebatkan di ruang publik.

Raja Ampat merupakan kawasan dengan nilai ekologis yang sangat strategis secara global, ditandai oleh tingginya keanekaragaman hayati laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang bersifat unik serta rentan terhadap gangguan antropogenik. Berbagai kajian ilmiah menunjukkan bahwa ekosistem pulau kecil dan wilayah perairan tropis sering kali menjadi pusat konsentrasi spesies dengan tingkat keunikan evolusioner yang tinggi, namun pada saat yang sama menghadapi risiko lingkungan yang tidak sebanding akibat aktivitas manusia berskala besar (Jetz et al., 2014). Karakteristik tersebut menjadikan wilayah seperti Raja Ampat memiliki kapasitas pemulihan ekologis yang terbatas ketika mengalami tekanan ekstraktif, termasuk pertambangan dan perubahan tata guna lahan. Dalam perspektif krisis lingkungan global, kawasan pesisir dan perairan tropis juga dihadapkan pada tekanan berlapis yang bersifat kumulatif, mulai dari degradasi habitat, pencemaran, hingga gangguan terhadap sistem perairan tawar dan laut yang saling terhubung (Reid et al., 2019). Ekosistem pesisir seperti mangrove, padang lamun, dan terumbu karang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologis dan menyerap karbon, namun pada saat yang sama merupakan ekosistem yang paling cepat terdegradasi akibat eksploitasi sumber daya dan perubahan tata kelola wilayah (McLeod et al., 2011). Kondisi tersebut menempatkan Raja Ampat bukan hanya sebagai aset konservasi nasional, tetapi juga sebagai bagian dari kepentingan ekologis global yang keberlanjutannya berkaitan langsung dengan stabilitas sistem bumi dan kesejahteraan lintas generasi. Kerusakan ekosistem di wilayah ini berpotensi menimbulkan dampak ekologis yang bersifat lintas batas, mengingat keterhubungan ekosistem laut, pesisir, dan darat dalam satu kesatuan sistem ekologis. Oleh karena itu, setiap bentuk aktivitas ekstraktif di kawasan dengan karakteristik ekologis sensitif seperti Raja Ampat membawa konsekuensi lingkungan yang jauh lebih besar dibandingkan wilayah lain dengan daya dukung yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, eksploitasi sumber daya alam di Raja Ampat tidak dapat dipahami semata sebagai persoalan ekonomi atau pembangunan regional, melainkan sebagai isu strategis yang menyangkut tanggung jawab ekologis, tata kelola lingkungan, dan keberlanjutan global.

Raja Ampat, sering disebut sebagai “surga terakhir di Bumi”, terkenal karena kekayaan keanekaragaman hayati baik di darat maupun di lautnya. Perairan Raja Ampat merupakan rumah bagi 75 persen spesies coral dunia dan punya lebih dari 2.500 spesies ikan. Daratan Raja Ampat memiliki 47 spesies mamalia dan 274 spesies burung. UNESCO juga telah menetapkan kawasan Raja Ampat sebagai global geopark (Green Peace, 2025). Raja Ampat juga merupakan lanskap budaya. Masyarakat adat telah menjaga perairan ini selama beberapa generasi melalui sasi dan sistem pengetahuan maritim leluhur lainnya. Dari seni gua prasejarah di Misool hingga sejarah lisan dan upacara tradisional, warisan wilayah ini mencerminkan hubungan yang dalam dan abadi antara manusia dan alam. Sayangnya, aktivitas tambang mengancam segala keindahan itu. Di sisi lain, pemberian izin terhadap

sejumlah perusahaan untuk aktivitas tambang nikel tidak lepas dari kebijakan politik pemerintah. Meski tujuannya untuk peningkatan perekonomian dan hilirisasi industri, kecenderungan campur tangan politik tidak bisa dilepaskan. Gerakan #Save Raja Ampat boleh jadi sebagai kampanye lanjutan dari gerakan Papua Bukan Tanah Kosong. Dari sisi lokasi dan persoalan yang terjadi, relatif serupa. Keduanya menyangkut eksplorasi alam Papua. Di Papua Barat, warga menolak pengrusakan tanah adat mereka yang dijadikan perkebunan kelapa sawit yang luasnya mencapai lebih dari 30.000 hektar. Kampanye #Save Raja Ampat tidak hanya dilakukan melalui media sosial, tapi dengan aksi protes secara langsung. Salah satu aksi yang paling ikonik yakni saat aktivis Greenpeace bersama empat pemuda asal Papua menyelip masuk ke dalam acara Indonesia *Critical Minerals Conference* 2025 di Jakarta, 3 Juni 2025 lalu. Mereka masuk ke ruang acara dan langsung membentangkan spanduk berlatar kuning dengan tulisan *NICKEL MINES DESTROY LIVES #Save Raja Ampat* sambil berteriak "Papua bukan tanah kosong!". Aksi itu dilakukan tepat saat Wakil Menteri Luar Negeri Arief Havas Oegroseno berpidato di depan delegasi dari berbagai negara (CNN Indonesia, 2025). Aksi itu boleh dibilang ampuh karena berhasil menarik perhatian, baik dari peserta konferensi maupun media massa yang hadir. Aksi itu lantas viral di jagat maya hingga bergulir jadi perhatian publik yang masif. Gerakan yang bermula dari kekhawatiran masyarakat lokal kemudian diadvokasi oleh komunitas lingkungan hidup itu berubah menjadi gerakan masif di mana publik tanah air ikut menyuarakan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa konflik lingkungan di Raja Ampat tidak hanya berlangsung pada ranah material dan kebijakan, tetapi juga pada ranah simbolik dan komunikatif, di mana makna, legitimasi, dan kepentingan diproduksi serta diperdebatkan di ruang publik. Literatur komunikasi lingkungan menegaskan bahwa kampanye dan gerakan lingkungan merupakan bagian dari praktik komunikasi politik yang berperan penting dalam membentuk partisipasi sipil, membangun kesadaran kolektif, dan menantang relasi kuasa yang mapan dalam tata kelola lingkungan (Brulle, 2010). Dalam konteks politik lingkungan kontemporer, komunikasi tidak lagi dipahami sekadar sebagai penyampaian informasi, melainkan sebagai arena deliberasi, kontestasi, dan mobilisasi yang menentukan arah kebijakan dan keadilan ekologis (Celermajer et al., 2021). Pendekatan keberlanjutan yang dinamis juga menekankan bahwa konflik lingkungan harus dibaca sebagai proses politik yang melibatkan berbagai narasi, pengetahuan, dan kepentingan yang saling bersaing dalam menentukan "jalur keberlanjutan" yang dianggap sah (Leach et al., 2010). Jurnal ini akan mengulas bagaimana gerakan #Save Raja Ampat muncul dari perspektif analisis pesan politik. Analisis ini menggunakan konsep politisasi identitas kolektif yang dibahas dalam karya bertajuk "*Politicized Collective Identity: A Social Psychological Analysis*" oleh Bernd Simon dan Bert Klandermans (Simon & Klandermans, 2001). Meskipun berbagai studi telah membahas konflik lingkungan dan gerakan masyarakat sipil dalam konteks ekstraktivisme, kajian yang secara khusus menempatkan kampanye lingkungan sebagai pesan politik masih relatif terbatas, terutama dalam konteks

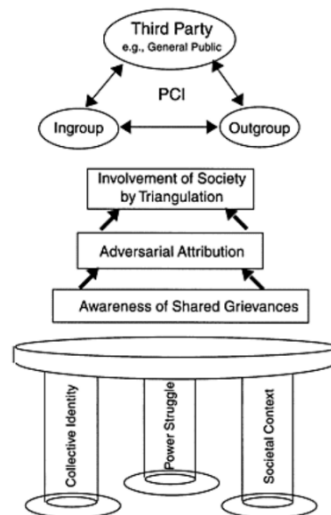
Indonesia. Banyak penelitian menitikberatkan pada dampak ekologis atau dinamika kebijakan, namun belum cukup mengeksplorasi bagaimana pesan perlawanan dikonstruksi, dimaknai, dan dipolitisasi melalui identitas kolektif dalam ruang publik. Oleh karena itu, analisis terhadap kampanye #Save Raja Ampat sebagai pesan politik menjadi penting untuk memahami bagaimana isu lingkungan dimediasi menjadi arena komunikasi politik yang melibatkan proses pembingkaihan, mobilisasi, dan politisasi identitas kolektif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis pesan politik untuk mengkaji kampanye #Save Raja Ampat sebagai bentuk komunikasi politik lingkungan. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada penafsiran makna, tujuan, dan relasi kuasa yang terkandung dalam pesan-pesan perlawanan terhadap kebijakan ekstraktif negara, bukan pada pengukuran kuantitatif perilaku atau sikap publik. Pendekatan analisis pesan politik dipilih karena kampanye #Save Raja Ampat tidak hanya merepresentasikan ekspresi penolakan terhadap kebijakan ekstraktif, tetapi juga berfungsi sebagai praktik komunikasi strategis yang bertujuan membangun identitas kolektif, memobilisasi dukungan publik, dan menantang legitimasi kekuasaan negara. Melalui analisis pesan, penelitian ini menelaah bagaimana makna, tujuan, dan relasi kuasa dikonstruksi dalam pesan-pesan kampanye, serta bagaimana pesan tersebut beroperasi dalam proses politisasi identitas kolektif sebagaimana dirumuskan oleh Simon dan Klandermans (Simon & Klandermans, 2001). Sejalan dengan perkembangan studi komunikasi lingkungan, penelitian ini memandang kampanye #Save Raja Ampat sebagai bagian dari arena komunikasi risiko dan konflik lingkungan, di mana pesan-pesan perlawanan berperan dalam membentuk persepsi publik, kepercayaan, serta respons kolektif terhadap ancaman lingkungan dan kebijakan negara (Xing et al., 2022). Literatur komunikasi risiko menekankan bahwa pesan lingkungan tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai instrumen politik yang memediasi hubungan antara aktor negara, korporasi, dan masyarakat dalam situasi ketidakpastian dan konflik kepentingan. Selain itu, penelitian ini memanfaatkan temuan studi tentang public-sphere pro-environmental behavior yang menempatkan aktivisme lingkungan sebagai bentuk tindakan kolektif di ruang publik. Studi tersebut menunjukkan bahwa identitas, kepercayaan, dan politisasi isu lingkungan berperan penting dalam mendorong partisipasi publik dan mobilisasi sosial, khususnya dalam bentuk aksi protes, kampanye, dan advokasi kebijakan. Perspektif ini memperkuat posisi kampanye #Save Raja Ampat sebagai praktik komunikasi politik yang berorientasi pada tindakan kolektif, bukan sekadar ekspresi sikap individual. Kerangka analisis utama dalam penelitian ini menggunakan konsep politicized collective identity yang dikembangkan oleh Simon dan Klandermans (2001). Identitas kolektif dipahami sebagai identitas bersama yang membedakan suatu kelompok dari kelompok lain dan menjadi sumber motivasi dalam perjuangan kekuasaan. Simon dan Klandermans menjelaskan bahwa proses politisasi identitas kolektif berlangsung

melalui tiga tahap utama, yaitu: (1) kesadaran atas keluhan bersama (collective grievance), (2) atribusi permusuhan terhadap aktor yang dianggap bertanggung jawab (adversarial attribution), dan (3) keterlibatan pihak ketiga atau masyarakat luas dalam konflik melalui proses triangulasi.

Gambar 1: Identitas Kolektif



(Simon & Klandermans, 2001)

Berdasarkan kerangka tersebut, analisis pesan dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji bagaimana pesan-pesan kampanye #Save Raja Ampat merepresentasikan keluhan kolektif masyarakat, membingkai aktor lawan dalam konflik lingkungan, serta memobilisasi dukungan publik yang lebih luas. Dengan demikian, metode ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana isu lingkungan dimediasi menjadi arena komunikasi politik melalui proses pemingkai, mobilisasi, dan politisasi identitas kolektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pesan Politik Kampanye #Save Raja Ampat

Hasil analisis menunjukkan bahwa kampanye #Save Raja Ampat berfungsi sebagai pesan politik lingkungan yang secara sistematis membingkai konflik pertambangan nikel sebagai persoalan ketidakadilan ekologis, pelanggaran hak masyarakat adat, dan kegagalan tata kelola negara. Pesan yang beredar baik aksi simbolik, pernyataan publik, maupun kampanye media sosial dapat aktif membangun makna politik atas eksploitasi sumber daya alam di Raja Ampat. Secara umum, pesan kampanye menampilkan tiga karakter utama. Pertama, pesan menegaskan keluhan kolektif masyarakat Raja Ampat atas kerusakan ruang hidup akibat aktivitas pertambangan. Lingkungan direpresentasikan bukan sekadar sebagai aset ekonomi atau sumber daya pembangunan, melainkan sebagai ruang hidup yang memiliki nilai ekologis, kultural, dan spiritual. Kedua, pesan secara eksplisit menunjuk aktor lawan, yaitu negara dan korporasi tambang, sebagai pihak

yang bertanggung jawab atas ketimpangan dan kerusakan lingkungan. Ketiga, pesan diarahkan untuk memobilisasi dukungan publik yang lebih luas, dengan mengaitkan isu lokal Raja Ampat ke isu nasional dan global mengenai keadilan lingkungan dan krisis ekologis. Dengan demikian, kampanye #Save Raja Ampat menunjukkan bahwa pesan lingkungan dapat beroperasi sebagai instrumen politik yang membentuk oposisi simbolik terhadap kebijakan negara, sekaligus memperluas konflik dari ranah lokal menuju arena komunikasi publik yang lebih luas.

Politicized Collective Identity dalam Gerakan #Save Raja Ampat

Untuk memahami bagaimana pesan-pesan tersebut bekerja secara politis, bagian ini membahas temuan penelitian dengan menggunakan kerangka politicized collective identity dari Simon dan Klandermans (2001) (Simon & Klandermans, 2001).

a. Kesadaran Identitas Kolektif

Tahap pertama yang teridentifikasi dalam kampanye #Save Raja Ampat adalah munculnya kesadaran identitas kolektif. Masyarakat Raja Ampat memosisikan diri sebagai kelompok adat yang memiliki hubungan historis dan emosional dengan wilayahnya. Dalam berbagai pesan kampanye, Raja Ampat direpresentasikan sebagai rumah, tanah adat, dan warisan leluhur, bukan sebagai ruang kosong yang siap dieksploitasi. Narasi ini memperlihatkan bahwa identitas adat tidak lagi berhenti pada dimensi kultural, tetapi berkembang menjadi identitas politik yang digunakan untuk menolak logika pembangunan ekstraktif. Kesadaran kolektif ini menjadi fondasi moral dan simbolik yang memperkuat legitimasi perlawanan terhadap tambang nikel.

b. Perebutan Kekuasaan Antar Kelompok

Dimensi kedua adalah perebutan kekuasaan antar kelompok yang bersifat asimetris. Kampanye #Save Raja Ampat membingkai konflik sebagai pertarungan antara masyarakat adat yang mengalami ketidakberdayaan struktural dengan negara dan korporasi yang memiliki kekuasaan politik dan ekonomi. Pesan-pesan perlawanan menyoroti minimnya pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta ketimpangan kontrol atas sumber daya alam yang berada di atas tanah adat. Dalam konteks ini, pesan politik tidak hanya menyampaikan ketidakpuasan, tetapi juga membangun oposisi simbolik antara “kami” (masyarakat adat dan pendukung lingkungan) dan “mereka” (pemerintah dan korporasi tambang). Oposisi ini memperjelas posisi konflik dan memperkuat dimensi politis dari identitas kolektif yang terbentuk.

c. Pelibatan Masyarakat yang Lebih Luas (Triangulasi)

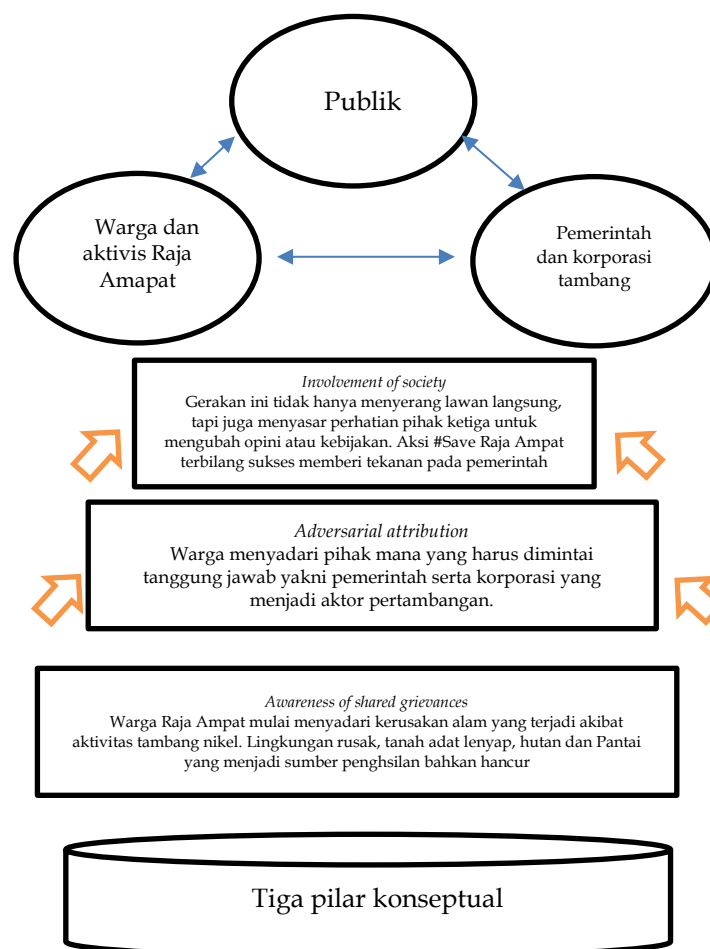
Tahap ketiga ditandai oleh proses triangulasi, yaitu pelibatan pihak ketiga dalam konflik. Kampanye #Save Raja Ampat berhasil menarik perhatian masyarakat luas melalui aksi langsung, ekspos media, dan kampanye digital. Isu lokal Papua kemudian diposisikan sebagai isu publik nasional bahkan global, terutama melalui narasi krisis lingkungan dan ketidakadilan ekologis. Dukungan publik yang meluas menciptakan tekanan politik tambahan terhadap pemerintah dan korporasi. Pada

tahap ini, identitas kolektif masyarakat Raja Ampat tidak lagi bersifat lokal, tetapi terhubung dengan identitas kolektif yang lebih luas, yaitu kelompok masyarakat yang peduli terhadap keadilan lingkungan dan keberlanjutan.

Diskusi Teoretis: Pesan Politik Lingkungan dan Mobilisasi Kolektif

Temuan penelitian ini memperkuat argumen bahwa konflik lingkungan kontemporer tidak hanya berlangsung pada ranah kebijakan dan material, tetapi juga pada ranah komunikasi politik. Kampanye #Save Raja Ampat menunjukkan bagaimana pesan lingkungan dapat berfungsi sebagai mekanisme pembingkai (framing) yang menghubungkan pengalaman lokal dengan narasi keadilan ekologis yang lebih luas. Dalam perspektif komunikasi politik lingkungan, pesan-pesan perlawanan berperan dalam membentuk kesadaran kolektif, memproduksi oposisi simbolik, dan memobilisasi dukungan publik. Proses ini menegaskan bahwa politisasi identitas kolektif merupakan mekanisme kunci dalam mengubah isu lingkungan menjadi isu politik yang diperdebatkan secara luas di ruang publik.

Tabel 1: Penerapan teori Politicized Collective Identity pada gerakan #Save Raja Ampat





Berdasarkan pemetaan konseptual pada Tabel 1, dapat disimpulkan bahwa kampanye #Save Raja Ampat menunjukkan proses politisasi identitas kolektif yang berlangsung secara sistematis dan berlapis. Identitas masyarakat Raja Ampat tidak berhenti sebagai identitas kultural-adat, melainkan mengalami transformasi menjadi identitas politik yang digunakan untuk menantang relasi kuasa dalam kebijakan ekstraktif negara. Proses kesadaran atas keluhan bersama, atribusi permusuhan terhadap aktor negara dan korporasi, serta pelibatan publik yang lebih luas melalui triangulasi memperlihatkan bagaimana pesan-pesan perlawanan berfungsi sebagai mekanisme utama dalam mobilisasi kolektif. Dengan demikian, tabel ini menegaskan bahwa konflik lingkungan di Raja Ampat tidak hanya dimediasi melalui kebijakan dan tindakan material, tetapi juga melalui konstruksi pesan politik yang membentuk makna, posisi aktor, dan arah perjuangan dalam ruang komunikasi publik.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kampanye #Save Raja Ampat tidak dapat dipahami semata sebagai bentuk advokasi lingkungan, melainkan sebagai praktik komunikasi politik yang berfungsi memediasi konflik ekstraktivisme dalam ranah simbolik dan diskursif. Melalui analisis pesan politik, kampanye ini terbukti mampu mengonstruksi isu pertambangan nikel sebagai persoalan keadilan ekologis, pelanggaran hak masyarakat adat, serta kegagalan tata kelola lingkungan oleh negara. Dengan demikian, konflik lingkungan di Raja Ampat tidak hanya berlangsung pada level material dan kebijakan, tetapi juga pada level makna, legitimasi, dan relasi kuasa di ruang publik. Dengan menggunakan kerangka politicized collective identity (Simon & Klandermans, 2001), penelitian ini menemukan bahwa pesan-pesan kampanye #Save Raja Ampat merefleksikan tiga tahapan utama politisasi identitas kolektif, yaitu kesadaran atas keluhan bersama, atribusi permusuhan terhadap aktor yang dianggap bertanggung jawab, serta pelibatan masyarakat luas melalui proses triangulasi. Identitas masyarakat adat yang semula bersifat kultural mengalami transformasi menjadi identitas politik yang digunakan untuk menantang kebijakan ekstraktif negara dan memperluas dukungan publik terhadap perjuangan lingkungan. Temuan ini menegaskan bahwa pesan lingkungan memiliki peran strategis dalam membangun oposisi simbolik, memobilisasi tindakan kolektif, dan memperluas konflik lokal menjadi isu publik yang diperdebatkan secara nasional. Dalam konteks komunikasi politik lingkungan,

kampanye #Save Raja Ampat memperlihatkan bagaimana pesan perlawanan dapat menjadi instrumen politik yang efektif dalam membentuk kesadaran kolektif dan menekan relasi kuasa yang tidak seimbang dalam tata kelola sumber daya alam. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian komunikasi politik lingkungan dengan menempatkan identitas kolektif sebagai elemen kunci dalam analisis pesan gerakan lingkungan. Secara praktis, temuan penelitian ini menunjukkan pentingnya memperhatikan dimensi komunikatif dan partisipatif dalam perumusan kebijakan lingkungan, khususnya di wilayah dengan nilai ekologis tinggi dan keberadaan masyarakat adat. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan analisis ini dengan memperluas sumber data empiris, mengeksplorasi peran media digital secara lebih mendalam, serta membandingkan dinamika pesan politik lingkungan di berbagai konteks konflik sumber daya alam.

DAFTAR RUJUKAN

- Brulle, R. J. (2010). From environmental campaigns to advancing the public dialog: Environmental communication for civic engagement. *Environmental Communication*, 4(1), 82–98. <https://doi.org/10.1080/17524030903522397>
- Celermajer, D., Schlosberg, D., Rickards, L., Stewart-Harawira, M., Thaler, M., Tschakert, P., Verlie, B., & Winter, C. (2021). Multispecies justice: theories, challenges, and a research agenda for environmental politics. *Environmental Politics*, 30(1–2), 119–140. <https://doi.org/10.1080/09644016.2020.1827608>
- CNN Indonesia. (2025). *Protes di Konferensi Nikel Internasional Aktivis Greenpeace Diamankan*.
- Eizenberg, E., & Jabareen, Y. (2017). Social sustainability: A new conceptual framework. *Sustainability (Switzerland)*, 9(1). <https://doi.org/10.3390/su9010068>
- Green Peace. (2025). *Kritik Industrialisasi Nikel, Aktivis Greenpeace Gelar Aksi di Konferensi Nikel Internasional di Jakarta*.
- Healy, N., & Barry, J. (2017). Politicizing energy justice and energy system transitions: Fossil fuel divestment and a “just transition.” *Energy Policy*, 108, 451–459. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2017.06.014>
- Jetz, W., Thomas, G. H., Joy, J. B., Redding, D. W., Hartmann, K., & Mooers, A. O. (2014). Global Distribution and Conservation of Evolutionary Distinctness in Birds. *Current Biology*, 24(9), 919–930. <https://doi.org/10.1016/j.cub.2014.03.011>
- Kabisch, N., Frantzeskaki, N., Pauleit, S., Naumann, S., Davis, M., Artmann, M., Haase, D., Knapp, S., Korn, H., Stadler, J., Zaunberger, K., & Bonn, A. (2016). Nature-based solutions to climate change mitigation and adaptation in urban areas: Perspectives on indicators, knowledge gaps, barriers, and opportunities for action. *Ecology and Society*, 21(2). <https://doi.org/10.5751/ES-08373-210239>
- Leach, M., Scoones, I., & Stirling, A. (2010). *Dynamic Sustainabilities; Technology, Environment, Social Justice; First Edition*.

-
- McLeod, E., Chmura, G. L., Bouillon, S., Salm, R., Björk, M., Duarte, C. M., Lovelock, C. E., Schlesinger, W. H., & Silliman, B. R. (2011). A blueprint for blue carbon: Toward an improved understanding of the role of vegetated coastal habitats in sequestering CO₂. In *Frontiers in Ecology and the Environment* (Vol. 9, Issue 10, pp. 552–560). <https://doi.org/10.1890/110004>
- Reid, A. J., Carlson, A. K., Creed, I. F., Eliason, E. J., Gell, P. A., Johnson, P. T. J., Kidd, K. A., MacCormack, T. J., Olden, J. D., Ormerod, S. J., Smol, J. P., Taylor, W. W., Tockner, K., Vermaire, J. C., Dudgeon, D., & Cooke, S. J. (2019). Emerging threats and persistent conservation challenges for freshwater biodiversity. *Biological Reviews*, 94(3), 849–873. <https://doi.org/10.1111/brv.12480>
- Rockström, J., Gupta, J., Qin, D., Lade, S. J., Abrams, J. F., Andersen, L. S., Armstrong McKay, D. I., Bai, X., Bala, G., Bunn, S. E., Ciobanu, D., DeClerck, F., Ebi, K., Gifford, L., Gordon, C., Hasan, S., Kanie, N., Lenton, T. M., Loriani, S., ... Zhang, X. (2023). Safe and just Earth system boundaries. *Nature*, 619(7968), 102–111. <https://doi.org/10.1038/s41586-023-06083-8>
- Simon, B., & Klandermans, B. (2001). *Politicized Collective Identity A Social Psychological Analysis*.
- Wolch, J. R., Byrne, J., & Newell, J. P. (2014). Urban green space, public health, and environmental justice: The challenge of making cities “just green enough.” *Landscape and Urban Planning*, 125, 234–244. <https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2014.01.017>
- Xing, Y., Li, M., & Liao, Y. (2022). Trust, Identity, and Public-Sphere Pro-environmental Behavior in China: An Extended Attitude-Behavior-Context Theory. *Frontiers in Psychology*, 13. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.919578>